

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
ABSTRAK	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pertanyaan Penelitian.....	5
1.3 Reviu Literatur.....	5
1.4 Kerangka Teori	12
1.5 Argumentasi Utama	18
1.6 Metode Penelitian	18
1.7 Sistematika Penulisan	20
BAB II	22
KONTEKS KONFLIK SEPARATIS MINDANAO DAN PATANI.....	22
2.1 Latar Belakang Historis Konflik Mindanao.....	22
2.1.1 Aktor Utama dan Struktur Konflik di Mindanao	24
2.1.2 Dinamika Politik dan Keamanan di Mindanao	25
2.1.3 Perkembangan Proses Penyelesaian Konflik di Mindanao	26
2.2 Latar Belakang Historis Konflik Patani.....	28
2.2.1 Aktor Utama dan Struktur Konflik di Patani	29
2.2.2 Dinamika Politik dan Keamanan di Patani	30
2.2.3 Perkembangan Proses Penyelesaian Konflik di Patani	31
2.3 Ringkasan Komparatif Mindanao dan Patani	33
BAB III.....	35
ANALISIS KASUS: MINDANAO DAN PATANI.....	35
3.1 <i>Framing</i> Konflik oleh Pemerintah Filipina	36
3.1.1 Definisi Masalah	37
3.1.2 Akar Masalah yang Ditekankan	38

3.1.3 Tujuan Kebijakan	39
3.1.4 Klasifikasi Aktor oleh Negara: Mitra Politik dan Ancaman Keamanan	40
3.1.5 Cara Komunikasi <i>Framing</i>	40
3.2 Orientasi Normatif Filipina dalam Kerangka <i>English School</i>	41
3.2.1 Rujukan Institusi Primer yang Dominan	42
3.2.2 Indikasi Kecenderungan Pluralis atau Solidaritas	43
3.2.3 Batas Legitimasi yang Dianggap Dapat Diterima dalam Orientasi Normatif Filipina	44
3.3 Legitimasi terhadap Aktor Eksternal dan Wujud Praktiknya di Mindanao	45
3.3.1 Bentuk Legitimasi: Mandat Formal, Undangan, dan Forum Resmi	45
3.3.2 Tingkat Akses: Ruang Gerak Aktor Eksternal dan Peran dalam Implementasi	46
3.3.3 Kelembagaan dan Kesenambungan: Mekanisme yang Bertahan Lintas Pemerintahan	47
3.4 Framing Konflik oleh Pemerintah Tailan	48
3.4.1 Definisi Masalah	49
3.4.2 Akar Masalah yang Ditekankan	49
3.4.3 Tujuan Kebijakan	50
3.4.4 Klasifikasi Aktor oleh Negara: Mitra Politik dan Ancaman Keamanan	51
3.4.5 Cara Komunikasi <i>Framing</i>	52
3.5 Orientasi Normatif Tailan dalam Kerangka <i>English School</i>	53
3.5.1 Rujukan Institusi Primer yang Dominan	54
3.5.2 Indikasi Kecenderungan Pluralis atau Solidaritas	55
3.5.3 Batas Legitimasi yang Dianggap Dapat Diterima dalam Orientasi Normatif Tailan	56
3.6 Legitimasi terhadap Aktor Eksternal dan Wujud Praktiknya di Patani	56
3.6.1 Bentuk Legitimasi: Pengakuan Formal maupun Informal dan Batas Mandat	57
3.6.2 Tingkat Akses: Ruang Gerak Aktor Eksternal, Sensitivitas, dan Kontrol Negara	58
3.6.3 Kelembagaan dan Kesenambungan: Stabilitas Mekanisme Lintas Periode	59
3.7 Ringkasan Temuan Dua Kasus	59
BAB IV	61
ANALISIS PERBANDINGAN DAN PEMBAHASAN TEMUAN	61
4.1 Kontras <i>Framing</i> Konflik: Mindanao dan Patani	62
4.1.1 Kontras Definisi Konflik dalam Narasi Pemerintahan	62
4.1.2 Perbedaan Penekanan Akar Masalah	63

4.1.3 Arah Tujuan Kebijakan: Penyelesaian Politik vs. Stabilisasi	64
4.1.4 Pola Klasifikasi Aktor dan Dampaknya terhadap Dialog	65
4.1.5 Strategi Komunikasi Pemerintah dan Pembatasan Ruang Aktor Eksternal	66
4.2 Kontras Orientasi Normatif dalam Kerangka <i>English School</i>	67
4.2.1 Kontras Rujukan Institusi Primer dalam Kebijakan Konflik	67
4.2.2 Perbandingan Kecenderungan Pluralis dan Solidaris	68
4.2.3 Konsekuensi Normatif terhadap Ambang Legitimasi	70
4.3 Kontras Legitimasi dan Praktik Keterlibatan Aktor eksternal	71
4.3.1 Mandat dan Pengakuan: Bentuk Legitimasi	71
4.3.2 Akses dan Kontrol: Ruang Gerak Aktor Eksternal	72
4.3.3 Stabilitas Mekanisme Keterlibatan Aktor Eksternal: Konflik Mindanao dan Konflik Patani	73
4.4 Pembahasan Mekanisme: Dari <i>Framing</i> ke Keputusan Legitimasi	74
4.4.1 Jalur Penjelasan Utama: <i>Framing</i> Konflik → Orientasi Normatif → Keputusan Legitimasi	75
4.4.2 Konflik Mindanao: Bagaimana Mekanisme Bekerja	76
4.4.3 Konflik Patani: Bagaimana Mekanisme Bekerja	77
4.5 Keterbatasan <i>English School</i> dan Faktor Kontekstual sebagai Pelengkap Analisis	78
4.5.1 Dinamika Politik Domestik dan Konfigurasi Kebijakan Keamanan	78
4.5.2 Struktur dan Fragmentasi Aktor Non-negara	79
4.5.3 Relasi Bilateral dan Sensitivitas Keamanan Lintas Batas	80
4.5.4 Konteks yang Memperkuat atau Mempertegas Orientasi Normatif	81
4.5.5 Karakter dan Identitas Negara sebagai Latar Pembentuk Framing	82
4.6 Ringkasan Perbandingan	83
BAB V	85
PENUTUP	85
DAFTAR PUSTAKA	89